

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DAN ASOSIASI PENGRAJIN BATIK DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI BLITAR

Oleh :

Devi Krisna Puspita Sari ¹⁾, Wydha Mustika Maharani²⁾, Eko Adi Susilo³⁾

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara

Universitas Islam Balitar

E-mail: krisnadevi564@gmail.com¹⁾ wydhamustika7@gmail.com²⁾ adisusiloeko@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to examine the form of collaboration between the local government and the batik artisan association in developing the creative industry in Blitar, with a focus on the role, obstacles, and impact on the regional economy and product competitiveness. The approach used is descriptive qualitative, with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The research findings show that this collaboration developed gradually and is in line with the principles of Collaborative Governance according to Ansell and Gash (2008), which include direct dialogue, building mutual trust, shared commitment, collective understanding, and achieving interim results. The positive impact of collaboration is seen in the increase in income of batik entrepreneurs by 50%-70%, increased production and promotional capacity, and the creation of new job opportunities. However, this process still faces obstacles, both structural (e.g., changes in association management and limited facilities), technical (lack of digital training), coordinative (minimal integration between agencies), and resource (budget cuts). Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector synergy, program continuity, and more optimal resource allocation so that this collaboration can provide long-term benefits for the development of the batik creative industry in Blitar.

Keywords: *collaborative governance, creative industri, batik, local government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan asosiasi pengrajin batik dalam mengembangkan industri kreatif di Blitar, dengan menitikberatkan pada peran, hambatan, serta pengaruhnya terhadap perekonomian daerah dan daya saing produk. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kolaborasi ini berkembang secara bertahap dan sejalan dengan prinsip Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2008), yang meliputi adanya dialog langsung, pembangunan rasa saling percaya, komitmen bersama, pemahaman kolektif, dan pencapaian hasil sementara. Dampak positif kolaborasi tampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha batik sebesar 50%-70%, bertambahnya kapasitas produksi dan promosi, serta terbukanya lapangan kerja baru. Namun, proses ini masih menghadapi kendala, baik struktural (misalnya pergantian kepengurusan asosiasi dan keterbatasan fasilitas), teknis (kurangnya pelatihan digital), koordinatif (minimnya integrasi antar-dinas), maupun sumber daya (pemangkasan anggaran). Untuk itu, dibutuhkan penguatan sinergi lintas sektor, kesinambungan program, dan pengalokasian sumber daya yang lebih optimal agar kolaborasi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan industri kreatif batik di Blitar.

Kata kunci: *collaborative governance, industri kreatif batik, pemerintah daerah*

1. PENDAHULUAN

Industri kreatif merupakan sektor strategis yang mengandalkan ide, kreativitas, dan nilai budaya sebagai modal utama untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi. Di Indonesia, sektor ini telah mendapatkan legitimasi formal melalui berbagai kebijakan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 mengenai Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa industri kreatif diakui tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal. Potensi pengembangannya semakin besar di daerah yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah kuat, salah satunya adalah Kabupaten Blitar yang dikenal dengan warisan budayanya yang beragam.

Salah satu subsektor yang menonjol dan memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya yang tinggi adalah batik. Batik tidak hanya diakui UNESCO pada 2009 sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, tetapi juga merepresentasikan filosofi, simbol, dan narasi sejarah yang melekat pada identitas daerah. Proses pembuatannya menggabungkan unsur estetika, keterampilan teknis, inovasi desain, serta pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional. Dalam aspek ekonomi, batik memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya pada tingkat usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM), serta industri rumahan yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Di Blitar, pengembangan industri batik dilakukan melalui kemitraan antara perajin dengan pemerintah daerah, di mana Asosiasi Batik Blitar Asli (Ababil) menjadi salah satu aktor kunci. Peran Ababil tidak terbatas sebagai wadah yang menaungi para perajin, tetapi juga sebagai motor penggerak pelestarian, pengembangan, dan promosi batik khas Blitar. Asosiasi ini aktif melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan membatik, pendampingan hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, serta promosi bersama melalui pameran dan media digital. Salah satu pencapaian penting yang dihasilkan adalah lahirnya motif-motif batik khas Blitar, antara lain Parabha Balitar, Puspa Dahana, dan Cakra Palah, yang masing-masing mengandung makna filosofis mendalam tentang kebangkitan daerah, semangat berkarya, dan simbol patriotisme Bung Karno.

Kolaborasi antara Ababil dan pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, telah diwujudkan dalam berbagai bentuk program. Program-program tersebut meliputi pelatihan membatik, fasilitasi keikutsertaan dalam pameran, pendampingan pendaftaran HKI, penyediaan fasilitas produksi, serta promosi melalui kanal digital. Pemerintah juga berperan membuka akses pasar, memberikan bantuan permodalan, dan menyelenggarakan festival budaya untuk

memperluas popularitas batik Blitar di tingkat regional maupun nasional.

Meskipun telah menghasilkan sejumlah capaian positif, kerja sama ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adalah sifat program yang cenderung seremonial dan kurang berkelanjutan, terbatasnya pendampingan jangka panjang, serta pola komunikasi yang masih dominan top-down sehingga partisipasi asosiasi belum optimal. Di sisi lain, perajin batik juga menghadapi permasalahan seperti keterbatasan bahan baku, rendahnya literasi digital, dan akses pasar yang masih sempit. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi memerlukan perencanaan yang lebih strategis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta mekanisme komunikasi yang lebih partisipatif.

Dengan demikian, arah pengembangan industri batik di Blitar perlu diarahkan pada bentuk kolaborasi yang lebih strategis, inklusif, dan berkesinambungan. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan regulasi, infrastruktur, dan akses pasar, sementara asosiasi perajin menjadi pusat inovasi produk sekaligus penjaga kelestarian nilai-nilai budaya. Sinergi yang terbangun diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat posisi industri batik sebagai penggerak ekonomi sekaligus simbol

identitas budaya daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu terkait industri batik dari berbagai perspektif. Nabila et al. (2023) menekankan pentingnya pemasaran digital sebagai sarana memperluas jangkauan pasar. Wijayanto et al. (2024) mengulas peran pemerintah dalam sosialisasi standar mutu ekspor, sedangkan Sulistyو et al. (2024) menyoroti inovasi desain berbasis komunitas. Sementara itu, Ghofar et al. (2024) meneliti kontribusi pemerintah dalam penyediaan bahan baku dan pelatihan bagi perajin. Namun demikian, kajian-kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek pemasaran, inovasi desain, atau pemberdayaan perajin secara individual, dan belum banyak yang membahas secara mendalam dinamika kolaborasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan asosiasi perajin batik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan Asosiasi Batik Blitar Asli (Ababil) dalam pengembangan industri kreatif batik di Blitar. Kajian ini memfokuskan pada bentuk kerja sama yang berjalan, peran masing-masing pihak, serta faktor pendukung dan penghambat terbentuknya kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan, dengan menggunakan perspektif teori Collaborative Governance sebagai kerangka analisis.

2. TINJAUAN TEORITIS

Collaborative Governance

Collaborative governance dalam

konteks administrasi negara, menurut Ansell & Gash, (2008), adalah suatu proses dan struktur tata kelola yang mengikutsertakan aktor-aktor dari sektor publik, privat, dan masyarakat sipil untuk secara kolektif membuat keputusan kebijakan publik melalui forum bersama yang *deliberatif* dan *Consensus-oriented*. Pelaksanaan *collaborative governance* bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme tata kelola yang memungkinkan lembaga pemerintah dan aktor non-negara terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan publik yang bersifat formal, *deliberatif*, dan *Consensus-oriented*. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk menciptakan forum bersama di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk berdiskusi, membangun pemahaman bersama, serta membuat keputusan yang mencerminkan kepentingan kolektif. Dengan demikian, *collaborative governance* tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

Asosiasi dalam Konteks Industri Kreatif Batik

Dalam industri kreatif berbasis budaya seperti batik, asosiasi memainkan peran strategis sebagai penggerak kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah daerah. Keberadaan asosiasi batik, seperti Asosiasi Batik Blitar Asli (Ababil), menjadi wadah koordinasi pengrajin batik dalam mengakses pelatihan,

promosi, serta memperjuangkan hak kekayaan intelektual. Asosiasi juga menjadi aktor kunci dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan mendorong regenerasi pengrajin muda. Penelitian oleh Sudarsono (2018) menunjukkan bahwa asosiasi batik di daerah berperan penting dalam mendukung keterlibatan pengrajin dalam berbagai program pemerintah, memperkuat jejaring usaha, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi serta kualitas produk.

Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang tumbuh berdasarkan ide, kreativitas, dan inovasi, serta berkontribusi terhadap pembentukan nilai ekonomi dan budaya. Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2009) menyebutkan bahwa industri kreatif mencakup berbagai subsektor, termasuk kerajinan tangan dan desain, di mana batik berada di dalamnya. Industri ini mengandalkan kekuatan intelektual serta ekspresi budaya sebagai nilai jual utamanya. Sementara itu, Unctad (2010) mendefinisikan industri kreatif sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang mencakup siklus penciptaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa yang menggunakan kreativitas dan kekayaan intelektual sebagai input utama. Industri ini mencakup subsektor seperti seni pertunjukan, musik, desain, arsitektur, kerajinan, hingga warisan budaya seperti batik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata dalam Paramitha, (2015), metode kualitatif

adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti memilih metode kualitatif untuk mendeskripsikan situasi atau peristiwa sehingga data yang dikumpulkan dapat dideskripsikan untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. Fokus penelitian ditentukan berdasarkan rumusan masalah proses tata kelola kolaboratif dalam pengembangan industri kreatif batik di Blitar, yang dianalisis menggunakan teori kolaboratif. Ansel and Gash (2008) memasukkan beberapa elemen penting: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil kolaborasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang dari Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar, Staff dari Dinas Kebudayaan Dan pariwisata Kota Blitar, Ketua Asosiasi Batik Blitar Asli (Ababil), dan Pemilik usaha Batik Jagad Jowo Kabupaten Blitar. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al., (2014) yang terdiri dari tiga langkah utama: kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data melibatkan seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi data yang dikumpulkan. Penyajian data memungkinkan informasi diatur dengan rapi, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Verifikasi data yang ditarik bersifat sementara dan dapat disesuaikan berdasarkan bukti baru yang muncul selama

proses pengumpulan data selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Komunitas Batik dalam Pengembangan Industri Kreatif di Blitar

Dinamika kolaborasi merujuk pada interaksi, hubungan, dan pola keterlibatan yang terbentuk antara individu, kelompok, maupun organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, kolaborasi mencakup sejumlah elemen penting seperti komunikasi yang efektif, koordinasi lintas sektor, pembagian tugas yang jelas, pengelolaan konflik yang konstruktif, serta mekanisme evaluasi bersama untuk memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai. Dinamika ini bukan hanya sekadar kerja sama formal, tetapi juga melibatkan aspek kepercayaan, rasa saling memiliki, dan komitmen bersama terhadap tujuan yang telah disepakati.

Dalam ranah administrasi publik, konsep collaborative governance menjadi kerangka teoritis yang banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena kolaborasi antar aktor dari berbagai sektor. Menurut Ansell & Gash (2008), collaborative governance merupakan suatu proses dan struktur tata kelola yang mengikutsertakan aktor-aktor dari sektor publik, privat, dan masyarakat sipil untuk secara kolektif membuat keputusan kebijakan publik melalui forum bersama yang bersifat deliberatif dan consensus-oriented. Model ini menekankan pada pentingnya keterlibatan langsung aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan publik yang

bersifat formal, terbuka, dan berorientasi pada kesepakatan bersama.

Tujuan utama dari collaborative governance adalah menciptakan mekanisme tata kelola yang memungkinkan setiap pihak yang terlibat memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam diskusi, membangun pemahaman bersama, serta merumuskan keputusan yang mencerminkan kepentingan kolektif. Forum bersama ini menjadi ruang untuk mengintegrasikan perspektif yang berbeda, meminimalisir konflik melalui dialog yang konstruktif, dan menghasilkan kebijakan yang memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Ansell & Gash (2008) menguraikan proses kolaborasi dalam collaborative governance melalui lima elemen utama, di antaranya:

a. Dialog Tatap Muka

Interaksi tatap muka pada tahap awal proses kolaborasi memiliki peran fundamental dalam membangun fondasi kerja sama yang kuat. Tatap muka bukan sekadar ajang bertukar informasi, melainkan ruang bersama untuk menyamakan persepsi, menyusun agenda bersama, mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masing-masing pihak, serta mencegah timbulnya potensi konflik yang dapat menghambat jalannya kolaborasi. Dalam pengembangan industri kreatif batik di Blitar, interaksi langsung ini menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan sejauh mana pemerintah daerah, komunitas batik, pelaku usaha, dan masyarakat umum dapat bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan bersama.

Hasil temuan lapangan dari wawancara dengan pengurus Asosiasi Batik Blitar Asli (Ababil), perajin batik, dan pejabat dinas terkait menunjukkan bahwa praktik dialog tatap muka telah dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. Bentuk implementasinya mencakup forum pembinaan yang diadakan secara berkala oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kegiatan sosialisasi kebijakan di tingkat kecamatan dan desa, hingga rapat koordinasi lintas sektor yang mengundang perwakilan asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan mitra strategis lainnya. Forum ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai arena diskusi substantif untuk membahas strategi pemasaran, peningkatan mutu produk, inovasi desain, serta solusi atas kendala produksi dan distribusi.

Interaksi langsung melalui tatap muka memiliki keunggulan dibanding komunikasi non-personal seperti surat resmi atau pesan digital, karena memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara dinamis dan responsif. Dalam situasi ini, bahasa tubuh, intonasi, dan ekspresi dapat menjadi media non-verbal yang memperkuat pesan, meminimalkan kesalahpahaman, dan mempercepat tercapainya kesepakatan. Hal ini selaras dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) yang menempatkan face-to-face dialogue sebagai elemen awal collaborative governance, di mana keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk membangun rasa saling percaya (trust building) dan saling memahami (mutual understanding).

Di Blitar, dialog tatap muka tidak hanya berfungsi untuk koordinasi program, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan. Misalnya, ketika pemerintah daerah memperkenalkan program promosi digital, sesi tatap muka digunakan untuk mendemonstrasikan langsung cara mengunggah produk ke platform e-commerce atau media sosial, sehingga perajin yang kurang akrab dengan teknologi dapat mempraktikkannya secara langsung dengan pendampingan. Demikian pula, ketika terjadi kelangkaan bahan baku kain mori, forum tatap muka menjadi media negosiasi bersama antara pemasok, perajin, dan pemerintah untuk mencari solusi distribusi yang adil.

Namun, meskipun manfaatnya jelas, terdapat tantangan yang mengiringi proses ini. Jadwal pertemuan yang padat sering kali sulit diikuti oleh perajin yang harus membagi waktu antara produksi dan kegiatan organisasi. Selain itu, ada risiko bahwa forum tatap muka bisa didominasi oleh pihak tertentu, sehingga mengurangi sifat inklusif dan partisipatif yang diidealkan dalam collaborative governance. Oleh karena itu, diperlukan desain forum yang memastikan semua pihak memiliki kesempatan bicara yang seimbang, serta adanya fasilitator netral yang mampu menjaga arah diskusi tetap produktif.

Secara keseluruhan, interaksi tatap muka di Blitar telah menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat pondasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan asosiasi perajin batik. Tidak hanya sebagai sarana koordinasi teknis, tatap muka juga

menjadi instrumen pembentukan kepercayaan, penguatan jejaring kerja sama lintas sektor, dan penciptaan pemahaman bersama mengenai arah pengembangan industri kreatif batik di tingkat lokal. Keberlanjutan mekanisme dialog ini diyakini akan menjadi kunci dalam menjaga konsistensi kolaborasi dan memastikan setiap kebijakan atau program yang diluncurkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil para pelaku industri.

b. Membangun Kepercayaan

Dalam proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas batik di Blitar, pembangunan kepercayaan (trust-building) telah menjadi elemen fundamental yang memengaruhi kualitas hubungan antaraktor dan efektivitas implementasi program pengembangan industri kreatif. Kepercayaan dipandang sebagai prasyarat penting yang memungkinkan terjadinya koordinasi yang efektif, keterbukaan informasi, serta pembagian peran yang proporsional di antara pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, terlihat bahwa kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat mulai terbentuk secara positif melalui mekanisme partisipatif yang diiringi dengan pola komunikasi berkesinambungan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kepercayaan adalah adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah tidak lagi memposisikan komunitas batik semata-mata sebagai penerima manfaat atau objek program, tetapi juga sebagai mitra strategis yang terlibat

secara aktif dalam perencanaan, perumusan agenda, dan pelaksanaan kegiatan. Model keterlibatan ini memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program, menumbuhkan tanggung jawab bersama, serta menciptakan ruang dialog yang sehat untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi kendala yang dihadapi.

Partisipasi komunitas batik dalam berbagai forum koordinasi dan kegiatan bersama, seperti pameran produk, pelatihan keterampilan, focus group discussion (FGD), hingga hearing dengan DPRD, menjadi bukti nyata adanya komunikasi dua arah yang setara dan saling memperkuat. Interaksi yang terjalin tidak hanya bersifat formal melalui pertemuan terjadwal, tetapi juga berkembang secara informal melalui kunjungan lapangan, komunikasi daring, dan inisiatif-inisiatif kolaboratif yang muncul dari bawah (bottom-up). Pola komunikasi ini secara bertahap membangun kedekatan emosional dan profesional di antara para aktor, sekaligus mengurangi potensi konflik maupun kesenjangan informasi.

Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan komunitas batik melalui dukungan terhadap inisiatif lokal. Beberapa contoh di antaranya adalah fasilitasi sertifikasi halal untuk produk batik, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) guna melindungi desain dan motif lokal, serta mediasi kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga keuangan. Langkah-langkah ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara

komitmen kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga memperkuat kepercayaan komunitas terhadap pemerintah sebagai mitra kolaborasi.

Temuan ini sejalan dengan kerangka Collaborative Governance yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), yang menempatkan kepercayaan sebagai faktor kunci dalam menciptakan kolaborasi yang efektif. Menurut kerangka tersebut, kepercayaan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui interaksi berulang yang konsisten, komunikasi yang transparan, dan keberhasilan bersama yang diraih dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pengembangan industri batik di Blitar, kepercayaan yang mulai terbangun ini menjadi modal sosial penting (social capital) yang dapat menopang keberlanjutan kolaborasi, meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan, dan memperluas peluang inovasi di masa depan.

c. Membangun Komitmen

Komitmen pemerintah dalam pengembangan industri kreatif di Blitar tercermin secara nyata melalui berbagai bentuk kemitraan strategis, fasilitasi program, dan pemberdayaan komunitas batik sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Upaya ini diarahkan untuk mendorong perajin dan pelaku usaha batik agar dapat naik kelas tidak hanya dari segi kapasitas ekonomi, tetapi juga dalam hal penguatan kelembagaan dan jejaring kemitraan. Pemerintah daerah memposisikan diri sebagai katalisator yang menghubungkan pelaku industri batik dengan berbagai sumber daya, baik yang berasal dari internal pemerintah maupun pihak eksternal,

seperti lembaga pendidikan, pelaku pasar, dan sektor swasta.

Implementasi komitmen tersebut dapat dilihat melalui pelibatan aktif asosiasi batik dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti pelatihan desain dan teknik produksi, pameran produk di tingkat lokal hingga nasional, serta program promosi yang memanfaatkan media digital. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi program lintas dinas untuk memastikan sinergi antar sektor, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat parsial tetapi terintegrasi. Pendekatan ini diperkuat dengan pemberian dukungan dalam bentuk fasilitasi hak kekayaan intelektual, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan akses permodalan bagi para pelaku usaha batik.

Meskipun proses penguatan kolaborasi ini masih berada pada tahap konsolidasi, arah kebijakan yang diambil menunjukkan pola yang inklusif dan partisipatif. Pemerintah membuka ruang dialog yang cukup luas bagi komunitas batik untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga program yang dirumuskan memiliki relevansi yang tinggi terhadap kondisi lapangan. Langkah ini membangun fondasi penting bagi keberlanjutan kolaborasi jangka panjang, di mana keberhasilan program tidak hanya diukur dari pencapaian target jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan menciptakan ekosistem industri batik yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Temuan ini sejalan dengan teori

Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada adanya komitmen kuat dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks pengembangan industri batik di Blitar, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam memainkan perannya sebagai fasilitator, inisiator, sekaligus mitra sejajar bagi komunitas batik. Keterlibatan yang bersifat dua arah ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan, memperkuat jejaring, dan menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, yang pada akhirnya akan memperbesar peluang tercapainya keberlanjutan kolaborasi dan peningkatan daya saing industri kreatif daerah.

c. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama (shared understanding) dalam konteks kolaborasi pengembangan industri kreatif dimaksudkan untuk menyatukan perspektif antar pemangku kepentingan serta membangun kesepahaman mengenai arah, visi, dan peran masing-masing pihak. Pemahaman ini berfungsi sebagai landasan normatif yang memungkinkan terciptanya koordinasi yang efektif, mengurangi potensi konflik, dan meminimalisasi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program. Dengan adanya kesamaan persepsi, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah, sementara kolaborasi lintas sektor dapat dijalankan dengan rasa saling percaya dan tujuan yang konsisten.

Hasil analisis lapangan menunjukkan

bahwa para aktor yang terlibat—mulai dari pemerintah daerah, asosiasi batik, pelaku usaha, hingga mitra eksternal—umumnya telah memiliki persepsi yang relatif sejalan mengenai urgensi pengembangan industri batik sebagai bagian integral dari ekonomi kreatif daerah. Kesepahaman ini tercermin dalam pandangan bersama bahwa industri batik tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang perlu dilestarikan. Lebih jauh, para aktor juga mulai menyadari pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi berbagai tantangan struktural dan teknis, seperti penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan pemasaran digital, pengembangan desain inovatif, serta penyediaan akses pelatihan dan pendampingan usaha.

Kendati demikian, temuan penelitian juga mengindikasikan adanya kesenjangan pada aspek implementasi, khususnya dalam hal pemerataan pendampingan teknis dan distribusi dukungan di antara pelaku industri batik. Kelompok dengan kapasitas kelembagaan dan akses informasi yang terbatas cenderung kurang mendapatkan manfaat optimal dari program kolaborasi yang ada. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun fondasi pemahaman bersama telah terbentuk, penguatan strategi implementasi masih diperlukan agar kolaborasi yang terjalin dapat berlangsung secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan kerangka Collaborative Governance yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), di mana pemahaman bersama merupakan salah

satu elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan komitmen di antara pemangku kepentingan. Tanpa keselarasan visi dan persepsi, kolaborasi berpotensi terhambat oleh perbedaan prioritas dan interpretasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman bersama harus diiringi dengan mekanisme komunikasi yang berkesinambungan, fasilitasi dialog antar pihak, serta monitoring terhadap pemerataan manfaat program, sehingga tujuan bersama dalam pengembangan industri batik di Blitar dapat tercapai secara optimal.

d. Hasil Sementara

Hasil sementara dari proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas batik di Blitar memperlihatkan adanya kemajuan awal yang cukup menjanjikan dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu penguatan daya saing batik lokal dan pemberdayaan pelaku industri kreatif di daerah. Kemajuan ini tercermin dari beberapa indikator awal yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Misalnya, dari sisi kualitas produk, sejumlah pengrajin telah berhasil mengembangkan desain motif baru yang mengangkat nilai budaya lokal, memperbaiki teknik pewarnaan agar lebih tahan lama, dan mulai mengadopsi bahan ramah lingkungan. Dari sisi sumber daya manusia, pelaku industri batik menunjukkan peningkatan keterampilan yang signifikan, baik keterampilan teknis membatik maupun kemampuan manajerial untuk mengelola usaha secara lebih profesional. Selain itu, terdapat tanda-tanda meningkatnya kesadaran dan kebanggaan masyarakat lokal dalam menggunakan produk batik khas daerah

sebagai bagian dari identitas budaya Blitar.

Temuan ini juga diperkuat oleh wawancara dengan berbagai narasumber, baik dari kalangan pemerintah, asosiasi perajin, komunitas batik, maupun pelaku usaha. Mereka menjelaskan bahwa bentuk konkret kolaborasi telah diwujudkan melalui beragam kegiatan, di antaranya penyelenggaraan pelatihan teknis membatik dan pengembangan desain, pendampingan dalam manajemen usaha dan pemasaran, fasilitasi legalitas usaha seperti pendaftaran hak cipta dan merek dagang, partisipasi aktif dalam promosi melalui pameran daerah maupun nasional, hingga pelibatan komunitas batik dalam event pariwisata dan budaya yang diinisiasi pemerintah daerah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa peningkatan keterampilan dan akses pasar, tetapi juga mendorong terciptanya jejaring kerja sama yang lebih luas antar-pelaku.

Jika dianalisis melalui kerangka Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), perkembangan ini menggambarkan fase awal dari siklus kolaborasi yang ideal. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan kolaborasi dibangun melalui proses bertahap yang dimulai dari pembentukan mutual understanding atau kesepahaman bersama di antara para aktor, diikuti oleh pembangunan kepercayaan (trust building) yang menjadi dasar kelancaran kerja sama, serta pelaksanaan tindakan bersama (joint action) yang berkelanjutan dan terukur. Fondasi inilah yang mulai terlihat di Blitar, meskipun masih berada pada tahap awal yang

memerlukan penguatan di banyak aspek. Capaian awal ini dapat dipandang sebagai indikasi bahwa kemauan politik (political will) dan komitmen kolektif dari para pihak sudah mulai terbentuk, walaupun intensitas dan kedalaman kolaborasinya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat integrasi yang optimal.

Meski demikian, hasil evaluasi terhadap proses kolaborasi ini menunjukkan bahwa sinergi yang terbentuk belum sepenuhnya bersifat integratif, inklusif, dan interaktif sebagaimana yang diidealkan dalam teori Collaborative Governance. Penilaian kinerja kolaborasi masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak, tanpa adanya mekanisme evaluasi bersama yang menyatukan perspektif dan indikator keberhasilan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi terkait sejauh mana kolaborasi telah memberikan manfaat konkret. Beberapa pelaku industri batik bahkan mengungkapkan bahwa mereka belum merasakan dampak signifikan, terutama dalam hal peningkatan jumlah pesanan, perluasan jaringan pemasaran, dan stabilitas harga produk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kolaborasi telah memberikan manfaat awal, output yang dihasilkan belum sepenuhnya terkonversi menjadi outcomes yang berdampak langsung pada kesejahteraan para pelaku.

Dalam konteks ini, penerapan pendekatan Outcome-based Evaluation menjadi sangat relevan. Pendekatan ini menilai keberhasilan kolaborasi tidak hanya dari aktivitas atau output yang dihasilkan misalnya jumlah pelatihan yang

diselenggarakan atau event promosi yang diikuti tetapi juga dari outcomes, yakni hasil nyata yang dirasakan oleh para pelaku industri, seperti peningkatan pendapatan, perluasan pasar, kemandirian usaha, dan keberlanjutan produksi. Pandangan Ketua Asosiasi Batik Blitar Asli (ABABIL) yang menekankan bahwa kesejahteraan pembatik merupakan indikator utama keberhasilan program kolaborasi, semakin menguatkan pentingnya orientasi pada hasil akhir yang terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar capaian administratif.

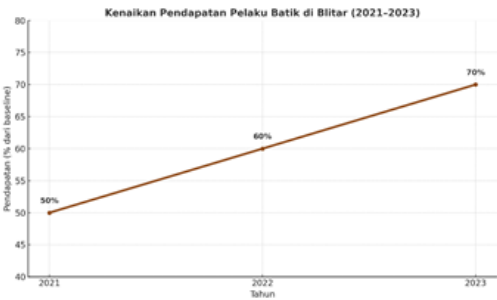
Hasil ini memperlihatkan bahwa kemajuan awal kolaborasi sudah memberikan pijakan yang penting bagi penguatan sektor batik di Blitar. Akan tetapi, keberlanjutan kemajuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk menjaga komitmen, menyelaraskan program, dan membangun mekanisme evaluasi bersama yang berorientasi pada hasil nyata. Tanpa adanya koordinasi lintas aktor yang lebih intensif dan strategi jangka panjang yang terintegrasi, capaian awal ini berisiko stagnan atau bahkan menurun. Penguatan kapasitas organisasi, penyusunan agenda kerja yang konsisten, serta penetapan indikator keberhasilan berbasis outcome menjadi langkah strategis yang dapat memastikan kolaborasi ini berkembang menuju model tata kelola kolaboratif yang efektif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pelaku industri kreatif di Blitar.

2. Dampak Pengembangan Industri Batik terhadap Perekonomian Daerah dan Daya

Saing Produk

a. Dampak Pengembangan Industri Batik Terhadap Perekonomian Daerah

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas batik di Blitar telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Secara keseluruhan, peningkatan perekonomian ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang berbasis budaya lokal, inovasi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital memiliki potensi besar dalam memperkuat industri batik sebagai bagian integral dari ekonomi kreatif.



Gambar 1 Grafik Kenaikan Pendapatan Pelaku Batik Blitar
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Blitar (2023)

Salah satu dampak utama yang terlihat adalah meningkatnya pendapatan para pelaku usaha batik sebesar 50%–70%, sebagai hasil dari pelatihan keterampilan yang dilaksanakan satu tahun sekali, peningkatan kualitas produk, dan berbagai fasilitasi promosi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, berkembangnya industri batik turut menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam proses produksi maupun di sektor pendukung seperti pemasaran, digitalisasi, hingga pariwisata. Hal ini sejalan dengan pandangan Unctad bahwa industri kreatif tumbuh di persimpangan antara ekonomi, budaya, dan teknologi. Melalui berbagai event dan pameran, daya saing produk batik Blitar pun meningkat, menjadikannya lebih kompetitif di pasar

regional maupun nasional. Keberadaan galeri batik di kawasan strategis seperti PIPP turut memperluas eksposur produk kepada wisatawan, sekaligus memberikan efek ganda terhadap sektor ekonomi lainnya seperti kuliner dan akomodasi.

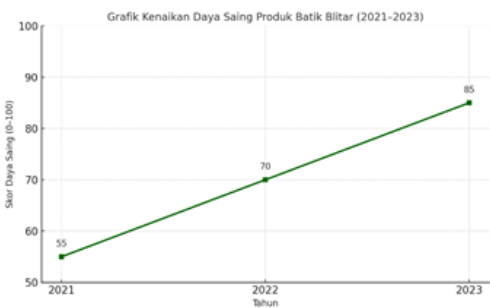
Namun demikian, proses kolaboratif dalam pengembangan industri batik di Blitar masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat optimalisasi dampaknya. Hambatan struktural muncul akibat pergantian pengurus asosiasi yang cukup sering, sehingga program kerja tidak berjalan secara konsisten. Selain itu, keterbatasan fasilitas teknis seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sarana pelatihan menghambat peningkatan kapasitas produksi. Minimnya pelatihan inovasi digital, pemasaran modern, serta keterbatasan akses teknologi juga menjadi tantangan teknis bagi para perajin. Dari sisi kelembagaan, koordinasi lintas dinas belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam aspek promosi dan distribusi pasar. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya dan pemangkasan anggaran yang berdampak pada minimnya frekuensi pelatihan dan partisipasi dalam pameran. Meski demikian, industri batik Blitar tetap menjadi representasi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan sumber daya manusia yang potensial untuk terus dikembangkan.

Secara keseluruhan, kolaborasi ini mencerminkan prinsip ekonomi kreatif menurut Unctad (2010), yakni sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang berbasis budaya, inovasi, dan nilai tambah lokal. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan

berkelanjutan, berbagai hambatan yang ada perlu segera ditangani secara sistematis, melalui koordinasi yang lebih integratif, keberlanjutan program lintas aktor, dan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan berpihak pada penguatan kapasitas pelaku industri kreatif lokal.

b. Dampak Pengembangan Industri Batik Terhadap Daya Saing Produk

Pengembangan industri batik di Blitar melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan komunitas batik telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan daya saing produk batik lokal. Proses kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif inovatif, seperti pengembangan desain motif yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal dan filosofi khas daerah, serta adaptasi terhadap tren pasar yang terus berkembang. Inovasi ini menjadikan batik Blitar bukan hanya sebagai produk tradisional, tetapi juga sebagai simbol identitas lokal yang kuat dan unik, yang mampu menarik perhatian konsumen dari berbagai segmen pasar.



Gambar 2 Grafik Kenaikan Daya Saing Produk Batik Blitar
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Blitar (2023)

Data diatas menunjukkan bahwa skor daya saing produk batik Blitar mengalami

peningkatan dari 55% pada tahun 2021 menjadi 85% pada tahun 2023, yang dimana menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas produk batik, pengelolaan merek yang lebih terarah, serta kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Peningkatan daya saing ini tidak terlepas dari partisipasi aktif asosiasi batik dalam berbagai ajang promosi. Partisipasi ini membantu memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat posisi batik Blitar di tingkat industri kreatif nasional.

Pemanfaatan teknologi digital melalui media sosial dan berbagai platform daring sebagai alat promosi telah menjadi strategi penting untuk memperkenalkan produk kepada generasi muda dan konsumen lintas wilayah. Penerapan konten digital yang menarik, interaktif, dan berkelanjutan memungkinkan produk batik Blitar menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat citra batik sebagai produk kreatif yang dinamis dan adaptif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Unctad (2010) yang menyatakan bahwa ekonomi kreatif berada pada titik temu antara kreativitas, budaya, ekonomi, dan teknologi.

Melalui integrasi keempat aspek tersebut, tercipta keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi lokal dan nilai tambah yang berkelanjutan. Pandangan Unctad juga menekankan pentingnya ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas budaya. Hal ini tercermin dari

meningkatnya eksposur dan permintaan terhadap batik Blitar di pasar lokal maupun nasional. Pelaku usaha batik mengalami pertumbuhan pendapatan, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk. Partisipasi batik Blitar dalam berbagai pameran, festival, dan promosi ekonomi kreatif turut memperluas akses pasar dan memperkuat posisinya dalam industri batik nasional.

5. PENUTUP

Proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas batik di Blitar dalam pengembangan industri kreatif menunjukkan perkembangan positif meskipun masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan kerangka Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), praktik kolaborasi yang terbentuk telah mencerminkan sejumlah elemen penting yang menjadi fondasi keberhasilan tata kelola kolaboratif. Elemen pertama adalah terbangunnya dialog tatap muka yang berfungsi sebagai sarana komunikasi awal sekaligus wadah penyamaan persepsi antaraktor. Dialog ini tidak hanya terbatas pada pertemuan formal, tetapi juga terjalin melalui forum pembinaan, sosialisasi langsung, dan rapat koordinasi yang melibatkan asosiasi batik, pelaku usaha, serta dinas terkait. Elemen kedua adalah tumbuhnya kepercayaan antar pihak, yang terlihat dari keterlibatan aktif komunitas batik dalam proses pengambilan keputusan dan kesediaan pemerintah untuk memberikan dukungan program. Elemen ketiga adalah komitmen pemerintah daerah yang tercermin dalam

fasilitasi berbagai inisiatif, mulai dari pelatihan peningkatan keterampilan, dukungan legalitas usaha, hingga penyelenggaraan event promosi. Elemen keempat adalah terbentuknya pemahaman bersama mengenai urgensi kolaborasi lintas sektor sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan daya saing batik lokal. Elemen kelima adalah tercapainya hasil sementara yang terukur, seperti peningkatan kapasitas pelaku batik, berkembangnya jaringan pemasaran, serta semakin dikenalnya batik Blitar di berbagai ajang promosi daerah maupun nasional.

Dampak positif dari kolaborasi ini dapat dilihat pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dari sisi ekonomi, peningkatan pendapatan pelaku usaha batik dilaporkan mencapai 50%-70%, disertai dengan terbukanya lapangan kerja baru di sektor produksi, pemasaran, dan pariwisata berbasis batik. Dari sisi daya saing produk, kolaborasi ini mendorong lahirnya inovasi motif yang mengangkat kekayaan budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, serta memperluas jangkauan pemasaran melalui keikutsertaan dalam pameran dan festival. Secara sosial-budaya, kesadaran masyarakat terhadap nilai dan identitas batik daerah semakin menguat, yang berimplikasi pada meningkatnya kebanggaan dan partisipasi dalam menjaga warisan budaya.

Namun, hasil positif ini belum sepenuhnya merepresentasikan kolaborasi yang integratif dan berkelanjutan. Masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi, seperti pergantian pengurus asosiasi yang

cukup sering sehingga mengganggu konsistensi program, keterbatasan fasilitas teknis seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), minimnya pelatihan di bidang promosi dan pemasaran digital, rendahnya koordinasi lintas dinas, serta adanya pemangkasan anggaran untuk kegiatan pelatihan dan pameran. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya distribusi manfaat kolaborasi bagi seluruh pelaku industri batik, terutama bagi perajin kecil yang belum memiliki akses optimal terhadap pasar dan teknologi.

Berdasarkan tantangan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan inklusivitas program, serta penerapan evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation) untuk memastikan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan (output), tetapi juga dari dampak nyata terhadap kesejahteraan perajin dan keberlanjutan industri batik. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan orientasi pada hasil jangka panjang, kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas batik di Blitar berpotensi menjadi model pengembangan industri kreatif berbasis budaya yang mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat identitas lokal di tengah arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar. (2023). Laporan perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) sektor batik di

- Kota Blitar tahun 2023. Blitar: Disperindag Kota Blitar.
- Ghofar, A., Wibisana, M. J., Nainggolan, L. F., Akmalia, D. S. N., Qisthia, S. A., Pangaribuan, R. H., & Faid, M. N. (2024). Pelatihan Value Added Product Innovation dan Digital Marketing untuk BUMDes Dan UMKM Selorejo Blitar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1.1), 325-331.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd.
- Nugroho, H. (2020). Pengertian motif batik dan filosofinya. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 28.
- Pandawangi, S. (2021). Metodologi Penelitian. *Journal Information*, 4, 15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Primasari, Y., Sulistiana, D., Sari, H. P., Sofyansyah, N. A., & Puspanegara, D. (2024). Meningkatkan pemasaran batik penataran sebagai wujud pemberdayaan pengrajin batik pertakina blitar. *Janita: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 4(2), 47-58.
- Putri, a. S. (2023). Strategi bisnis batik dalam upaya memperkenalkan kearifan lokal pada griya batik barata di desa tegalwaru kecamatan mayang kabupaten jember. *At-tawassuth: jurnal ekonomi islam*, viii(i), 119.
- Sulistyo, W. D., Awaliyah, S., Khakim, F. L., nur Hafida, M., Maisaroh, A. A., & Azizah, R. S. N. (2024). Inovasi Pola Batik Ikonik Situs Rambut Monte Menggunakan Ased Based Community untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Kreatif Desa Krisik. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(6), 1789-1803.
- De Beukelaer, C. (2014). Creative industries in developing countries: Questioning country classifications in the UNCTAD creative economy reports. *Cultural Trends*, 23(4), 232-251.
- Wijayanto, A., Sayyid, U., & Tulungagung, A. R. (2024). Nilai-Nilai Social Science di Dunia Pendidikan dan Masyarakat. Book Chapter (Vol. 1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11385524>